



BUKU PUTIH PERTAHANAN JEPANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP SENGKETA LAUT CHINA TIMUR

Rizki Roza*)

Abstrak

Buku Putih Pertahanan yang baru saja dikeluarkan Pemerintah Jepang menjadi perhatian banyak pihak karena secara jelas menempatkan Tiongkok sebagai sumber ancaman. Tiongkok mengekspresikan kekecewaannya terhadap Buku Putih tersebut. Penilaian Tiongkok sebagai ancaman dan reinterpretasi konstitusi yang dilakukan Pemerintahan Abe akan sangat mempengaruhi pengelolaan sengketa Laut China Timur dan bahkan arsitektur keamanan kawasan.

Pengantar

Pemerintah Jepang baru saja mengesahkan Buku Putih Pertahanan pada awal Agustus lalu. Buku Putih tersebut merupakan arah kebijakan pertahanan dan keamanan pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe yang di dalamnya menunjukkan ambisi Abe untuk meningkatkan kekuatan militer Jepang. Buku tersebut memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan kekuatan militer Tiongkok dan bahkan secara jelas menyebut Tiongkok sebagai salah satu ancaman, termasuk terkait sengketa kedua negara di Laut China Timur. Persoalan ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. *Pertama*, bagaimana Buku Putih tersebut melihat perkembangan kekuatan militer Tiongkok

dan bagaimana Tiongkok meresponsnya, serta apa pengaruhnya terhadap hubungan kedua negara, terutama dalam mengelola persoalan Laut China Timur. *Kedua*, bagaimana Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya harus menyikapi perkembangan tersebut?

Buku Putih Pertahanan Jepang

Buku Putih ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1970 dan secara rutin diperbaharui sejak tahun 1976. Pada tahun ini, buku setebal 500 halaman dan dikeluarkan pada awal Agustus 2014 disusun menjadi empat bagian utama yang menguraikan kondisi lingkungan keamanan Jepang, kebijakan pertahanan

*) Peneliti Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, E-mail: rizki.roza@dpr.go.id



dan keamanan, inisiatif pertahanan, dan kemampuan pertahanan Jepang.

Buku Putih tersebut memuat sejumlah persoalan yang berada di sekitar Jepang, seperti isu kedaulatan wilayah dan reunifikasi, serta peningkatan potensi-potensi masalah lainnya yang berkaitan dengan wilayah, kedaulatan, atau pun kepentingan ekonomi maritim. Kementerian Pertahanan Jepang menegaskan bahwa Jepang sedang menghadapi lingkungan keamanan yang semakin memburuk akibat peningkatan aktivitas militer di kawasan yang dilakukan negara-negara tetangganya, dan karena itu Jepang harus meningkatkan kemampuan keamanannya. Jepang juga memberikan perhatian pada tren modernisasi dan peningkatan kekuatan militer negara-negara tetangganya. Dengan kondisi demikian, menurut Jepang, persoalan-persoalan keamanan dan faktor-faktor yang dapat mengganggu stabilitas kawasan Asia Pasifik akan semakin serius. Di samping itu, Buku Putih ini juga menyinggung isu reinterpretasi terhadap konstitusi *pacifist*-nya yang memungkinkan kekuatan militer Jepang untuk terlibat dalam *collective self-defense*, sebuah pergeseran keamanan yang memiliki signifikansi historis.

Shinzo Abe adalah salah satu tokoh yang secara konsisten berupaya melakukan perubahan terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang. Berdasarkan Pasal tersebut, Jepang tidak akan membangun kekuatan militer kecuali untuk memenuhi kebutuhan pertahanan diri (*Self-Defense Force*). Perubahan lingkungan strategis, kemajuan pesat kekuatan dan teknologi militer Tiongkok, program rudal dan nuklir Korea Utara merupakan faktor-faktor yang mendorong upaya amandemen Konstitusi Jepang. Tuntutan AS agar Jepang berperan lebih besar dalam kerangka perjanjian pertahanan kedua negara juga sangat mempengaruhi upaya mengamandemen konstitusi *pacifist* tersebut.

Perubahan interpretasi terhadap konstitusi yang dilakukan Pemerintahan PM Shinzo Abe pada Juli lalu dijalankan tanpa melibatkan publik melalui referendum dan tanpa dukungan parlemen sebagaimana disyaratkan konstitusi. Meskipun tindakan tersebut telah menyebabkan menurunnya dukungan terhadap Abe dan memicu banyak protes, tampaknya Buku Putih

menggambarkan kebijakan Abe tersebut sebagai suatu tindakan *deterrent* yang diperlukan. Terlihat ada upaya untuk memberikan pembenaran pada upaya Abe meningkatkan kekuatan militer Jepang dengan menyebut peningkatan aktivitas militer negara-negara tetangganya di kawasan sebagai tantangan yang harus dihadapi Jepang.

Sekalipun menurut sebagian pengamat bahwa perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan kekuatan militer Tiongkok di dalam Buku Putih tersebut bukan sesuatu yang mengejutkan, hal ini menjadi sesuatu yang sangat mencolok dan menjadi perhatian banyak pihak. Jepang menunjukkan perhatian serius pada perkembangan militer Tiongkok dan aktivitas Tiongkok di Laut China Timur dan Selatan, pembentukan *Air Defence Identification Zone* (ADIZ) di Laut China Timur dan insiden 'pertemuan' pesawat militer Tiongkok dan Jepang yang sangat jarang terjadi.

Sementara Jepang akhir-akhir ini berupaya mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan Tiongkok untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Perhatian yang cukup besar terhadap Tiongkok terkait berbagai perkembangan baru yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan kekhawatiran Jepang terhadap Tiongkok. Buku Putih pertahanan Jepang secara spesifik menyebutkan bahwa berbagai perkembangan di Tiongkok termasuk pembentukan ADIZ di Laut China Timur di sekitar wilayah yang disengketakan kedua negara, telah menyebabkan terganggunya hubungan diplomatik kedua negara.

Respons Tiongkok

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengekspresikan kekecewaannya terhadap Buku Putih ini. Dalam pandangan Tiongkok, Buku Putih tersebut sangat bertentangan dengan keinginan yang Jepang sampaikan sebelumnya untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Buku Putih pertahanan Jepang menempatkan pertumbuhan militer Tiongkok sebagai ancaman, sementara Tiongkok sendiri menganggap pertumbuhan militer dan aktivitas maritim yang mereka jalankan berlangsung secara normal dan tidak perlu dipandang sebagai ancaman. Bagi Tiongkok,

sikap Jepang itu justru dapat meningkatkan potensi ketegangan di antara kedua negara.

Merespons Buku Putih tersebut, Tiongkok kembali menegaskan bahwa aktivitas maritim dan udara yang mereka jalankan tidak bertentangan dengan hukum nasional dan internasional. Bagi Tiongkok, penetapan ADIZ di Laut China Timur merupakan tindakan yang sah dan sejalan dengan praktek dan hukum internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, Tiongkok memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah sengketa teritorial dan maritim melalui dialog dan konsultasi, dan Tiongkok selalu mengajak Jepang untuk menjalankan dialog mengenai sengketa maritim berlandaskan prinsip saling menghormati dan kesetaraan. Baginya, Jepang telah mengabaikan upaya-upaya Tiongkok tersebut dan justru mempersalahkan Tiongkok dengan menempatkan Tiongkok sebagai ancaman. Buku Putih pertahanan Jepang mencerminkan pandangan dan kebijakan negatif pemerintahan Jepang saat ini terhadap Tiongkok.

Dalam penilaian Tiongkok, Jepang telah menggunakan isu 'Tiongkok sebagai ancaman' sebagai pembenaran untuk melakukan pengembangan militernya sendiri dan melepaskan diri dari batasan-batasan yang berlaku selama ini pada militernya. Tindakan tersebut, bagi Tiongkok, sangat tidak bertanggung jawab dan dapat membahayakan hubungan kedua negara. Tiongkok berharap Jepang dapat lebih mengutamakan kepentingan bersama kedua negara, serta perdamaian dan stabilitas kawasan secara keseluruhan. Jepang diharapkan dapat berpandangan positif dan menjalankan kebijakan positif pula terhadap Tiongkok demi mengembangkan sikap saling percaya dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.

Buku Putih dan Sengketa Laut China Timur

Sikap Jepang yang secara jelas menyatakan Tiongkok sebagai ancaman sebagaimana tergambar dalam Buku Putih pertahanan tersebut akan sangat mempengaruhi perilaku kedua negara dalam mengelola sengketa di Laut China Timur. Kondisi ini juga tidak dapat dipisahkan

dengan kebijakan Abe yang menyetujui reinterpretasi atas Konstitusi Jepang yang telah dilakukan lebih dahulu pada 1 Juli lalu.

Perubahan interpretasi atas konstitusi Jepang telah memperluas hak mempertahankan diri Jepang sehingga memungkinkan militer Jepang untuk menjalankan tindakan-tindakan yang selama ini dilarang berdasarkan Pasal 9 Konstitusi Jepang. Dengan reinterpretasi ini, kekuatan militer Jepang akan dimungkinkan untuk terlibat mempertahankan sekutu yang sedang diserang. Reinterpretasi ini juga memungkinkan Jepang untuk berperan lebih besar dalam aliansinya dengan Amerika Serikat (AS) yang selama ini sangat terbatas.

Pembagian beban yang lebih seimbang telah sejak lama menjadi tuntutan AS terhadap Jepang dalam persekutuan kedua negara itu, dan tidak mengalami penurunan meskipun Pemerintahan Obama menjalankan strategi *rebalancing* di kawasan Asia Pasifik. Melalui perluasan peran militernya, Jepang berusaha meyakinkan AS bahwa mereka merupakan sekutu penting dan mampu merespons tuntutan AS. Hal ini menjadi penting mengingat Jepang memiliki kekhawatiran akan melemahnya komitmen AS terhadap keamanan Jepang akibat adanya peningkatan hubungan ekonomi AS-Tiongkok. Beban yang lebih seimbang di antara dua negara sekutu ini, AS-Jepang, akan sangat mempengaruhi perimbangan kekuatan di kawasan Asia Pasifik, terutama bagaimana Jepang dan AS akan mengelola persoalan Laut China Timur dan persoalan lainnya yang menyangkut kepentingan kedua negara.

Semakin luasnya peran yang dapat dijalankan oleh kekuatan militer Jepang tampaknya tidak hanya terbatas akan mempengaruhi perkembangan sengketa di Laut China Timur tetapi juga persoalan lainnya yang menjadi kepentingan negara-negara tetangga Jepang di kawasan. Jepang akan dinilai sebagai sekutu potensial bagi sejumlah negara di kawasan, seperti Filipina atau Australia yang juga memiliki kesepakatan keamanan dengan AS. Negara-negara Asia Tenggara yang memiliki persoalan dengan Tiongkok, seperti Vietnam, akan sangat mungkin untuk mengembangkan kerja sama keamanan dengan Jepang.

Sejauh mana kerja sama keamanan antara Jepang dengan negara tetangga

lainnya di kawasan, seperti Filipina, Vietnam, dan Australia akan tergantung pada kesamaan persepsi mereka mengenai Tiongkok sebagai sumber ancaman. Perilaku Tiongkok dalam mengelola persoalan sengketa Laut China dan rendahnya transparansi pengembangan kekuatan militernya akan menentukan bagaimana hubungan kerja sama Jepang dengan negara-negara tersebut akan berkembang. Dengan meningkatnya asertivitas Tiongkok, maka bukan tidak mungkin kerja sama keamanan akan terus meningkat, tidak terbatas pada pertukaran informasi intelijen namun dapat mencapai *collective self-defense* sebagaimana terjadi antara Jepang dan AS, atau berupa kerja sama triangular. Negara Asia Tenggara yang bersengketa dengan Beijing di Laut China Selatan dan memiliki ketimpangan kekuatan militer yang begitu besar, seperti Vietnam, sangat berpotensi untuk meningkatkan kerja sama keamanan dengan Jepang. Jika ini terjadi, maka akan membawa perubahan signifikan pada perimbangan kekuatan di kawasan dan menciptakan kawasan yang lebih multipolar, meskipun Jepang masih membutuhkan waktu untuk membangun kekuatan militernya agar mampu memberikan jaminan keamanan bagi negara-negara tersebut.

Keputusan pemerintahan Abe pada 1 April untuk mencabut embargo senjata yang mereka terapkan sendiri juga akan memberikan pengaruh signifikan. Jepang telah menerapkan embargo yang melarang negaranya untuk melakukan penjualan persenjataan ke negara lain sejak tahun 1976. Dengan dicabutnya larangan ekspor persenjataan tersebut, Jepang saat ini dapat melakukan transfer sistem persenjataan dan teknologi militer kepada negara-negara sahabatnya dan juga dapat melakukan kerja sama pengembangan sistem persenjataan. Setelah pencabutan larangan itu, berbagai kesepakatan kerja sama transfer persenjataan dan teknologi militer pun diupayakan misalnya dengan Australia, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Vietnam dan Filipina.

Penutup

Kebijakan pertahanan Jepang yang diuraikan dalam Buku Putih Pertahanan dan reinterpretasi konstitusi yang dilakukan Pemerintahan Abe serta inisiatif-inisiatif lainnya yang merubah postur pertahanan

Jepang akan memungkinkannya memiliki peran yang lebih besar dalam arsitektur keamanan kawasan. Indonesia, bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya harus terus mengamati perkembangan ini dan semestinya dapat memperoleh manfaat. Tanpa harus membangun aliansi dengan Jepang dan berhadapan langsung dengan Tiongkok, kehadiran Jepang sebagai kekuatan besar yang dapat mempengaruhi perimbangan kekuatan di kawasan semestinya dapat dimanfaatkan oleh ASEAN sebagai kekuatan tawar dalam mengelola persoalan sengketa di Laut China Selatan.

Referensi

- "Beijing warns all outside Asean against involvement in South China Sea disputes", <http://www.scmp.com/news/china/article/1570272/beijing-warns-all-outside-asean-against-involvement-south-china-sea>, diakses tanggal 9 Agustus 2014.
- "China says Japan's defense policy contradictory to improving ties", http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-08/08/c_133540450.htm, diakses tanggal 9 Agustus 2014.
- "Cina Keberatan dengan Buku Putih Pertahanan Jepang", <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/08/05/n9u7d0-cina-keberatan-dengan-buku-putih-pertahanan-jepang>, diakses tanggal 9 Agustus 2014.
- "Defense of Japan 2014", http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2014.html, diakses tanggal 9 Agustus 2014.
- "Japan ups rhetoric against China in white paper for military expansion", http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-08/05/c_133534133.htm, diakses tanggal 9 Agustus 2014.
- "Jepang Keluarkan Buku Putih Pertahanan 2014", <http://indonesian.cri.cn/201/2014/08/06/1s150550.htm>, diakses tanggal 9 Agustus 2014.
- "Lionel Pierre Fatton, Japan's New Defense Posture", <http://thediplomat.com/2014/07/japans-new-defense-posture/>, diakses tanggal 9 Agustus 2014.